

Mengenal Lika-Liku Politik Indonesia dari Orde Lama ke Masa Reformasi

Desmi Sofia¹, Reno Fernandes^{2*}, Suryanef Suryanef³

^{1,2,3}Universitas Negeri Padang

*Corresponding author, e-mail: renofernandes@fis.unp.ac.id

Abstrak

Jurnal ini membahas evolusi politik Indonesia dari masa Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi, dengan menyoroti dinamika kekuasaan, perubahan sistem pemerintahan, serta tantangan dalam membangun demokrasi. Setiap periode memiliki karakteristik tersendiri, Orde Lama dengan eksperimen demokrasi parlementer yang berujung pada sentralisasi kekuasaan; Orde Baru yang menghadirkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi melalui pendekatan otoritarian; serta era Reformasi yang membuka ruang demokrasi namun masih dihadapkan pada tantangan prosedural dan budaya politik lama. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis literatur untuk menelusuri kontinuitas dan perubahan praktik politik di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun secara formal Indonesia telah bertransformasi menjadi negara demokratis, praktik politik lama seperti dinasti politik, politik transaksional, dan lemahnya penegakan hukum masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, reformasi politik perlu diarahkan tidak hanya pada perubahan kelembagaan, tetapi juga pada perbaikan budaya dan etika politik.

Kata Kunci: Orde baru; Orde lama; Politik Indonesia; Reformasi.

Abstract

This journal discusses the evolution of Indonesian politics from the Old Order, New Order, to the Reformation era, highlighting the dynamics of power, changes in government systems, and challenges in building democracy. Each period has its own characteristics: the Old Order with its parliamentary democracy experiment that led to the centralization of power; the New Order that brought stability and economic growth through an authoritarian approach; and the Reformation era that opened up democratic space but still faced procedural challenges and old political culture. This study uses a descriptive qualitative approach with literature analysis to explore the continuity and change of political practices in Indonesia. The results show that although Indonesia has formally transformed into a democratic country, old political practices such as political dynasties, transactional politics, and weak law enforcement are still an obstacle. Therefore, political reform needs to be directed not only at institutional change, but also at improving political culture and ethics.

Keywords: Indonesian Politics; New Order; Old Order; Reformation.

How to Cite: Sofia, D., Ferannndes, R. & Suryanef, S. (2025). Mengenal Lika-Liku Politik Indonesia dari Orde Lama ke Masa Reformasi. *Jurnal Kajian Sosial Humaniora*, 1(4), 217-227.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2025 by author.

Pendahuluan

Sejarah politik Indonesia merupakan perjalanan panjang yang penuh dinamika, perubahan rezim, serta pergulatan antara kekuasaan dan aspirasi rakyat. Sejak kemerdekaan pada tahun 1945, bangsa Indonesia telah melalui fase-fase penting dalam sistem pemerintahan, mulai dari Orde Lama yang bercorak parlementer dan Demokrasi Terpimpin, Orde Baru yang bersifat otoriter, hingga era Reformasi yang membuka jalan bagi demokratisasi dan keterbukaan politik. Setiap periode membawa dampak signifikan terhadap struktur kekuasaan dan partisipasi politik masyarakat.

Pada masa Orde Lama, sistem parlementer mengalami kegagalan karena ketidakstabilan partai politik dan konflik ideologis yang intens. Menurut (Mustamin, 2024) "struktur ketatanegaraan pada masa ini menunjukkan kegagapan dalam menerapkan sistem pemerintahan yang efektif, di tengah tarik-menarik kekuatan politik yang belum stabil." Transisi ke Demokrasi Terpimpin menempatkan kekuasaan di tangan Presiden Soekarno secara lebih dominan, yang kemudian dianggap sebagai respons atas krisis sistemik pada demokrasi parlementer.

Kemudian, Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto menandai era stabilitas semu yang dibangun melalui kontrol militer dan birokrasi. Meskipun berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi, sistem politik Orde Baru sangat sentralistik dan represif. (Hidayat & Taufikurrahman, 2020) mencatat bahwa "era Orde Baru membungkam aktivisme politik mahasiswa dan mengendalikan media sebagai alat legitimasi kekuasaan." Begitu pula menurut (Bakri, 2023), "pengaruh media massa diarahkan untuk melanggengkan kekuasaan dan menumpulkan kritik publik terhadap negara."

Runtuhnya Orde Baru pada 1998 merupakan momentum penting dalam sejarah demokrasi Indonesia. Era Reformasi hadir dengan semangat pembaruan: desentralisasi kekuasaan, pemilu multipartai, dan penguatan institusi demokrasi. Namun demikian, berbagai tantangan struktural tetap muncul. (Mahpudin, 2021) menggarisbawahi bahwa "demokrasi Indonesia pascareformasi masih sebatas prosedural dan belum menyentuh substansi keadilan sosial dan politik." Dinamika ini diperkuat oleh analisis (Permana, 2022) yang menunjukkan bahwa "struktur oligarkis masih mendominasi politik lokal, menciptakan kontradiksi antara semangat demokrasi dan praktik kekuasaan."

Di sisi lain, isu dinasti politik dan populisme menjadi perhatian dalam era kontemporer. (Ulla et al., 2024) menilai bahwa "kemunculan dinasti politik pasca reformasi mengindikasikan replikasi pola-pola kekuasaan Orde Baru dalam wajah baru." Oleh karena itu, memahami dinamika transisi politik dari Orde Lama hingga Reformasi

menjadi penting untuk melihat bagaimana warisan politik masa lalu masih mempengaruhi konfigurasi kekuasaan hari ini.

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait Lika Liku Politik di Indonesia dari Masa Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi. Kajian ini diharapkan dapat memberikan refleksi yang konstruktif terhadap perkembangan demokrasi Indonesia serta tantangan yang harus dihadapi dalam membangun sistem politik yang adil dan berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggali dan menganalisis dinamika politik Indonesia dalam kurun waktu yang panjang, khususnya dari masa Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi. Sumber data sekunder diperoleh dari database akademik seperti Google Scholar dan ScienceDirect, serta sumber lokal seperti Garuda dan portal jurnal nasional terakreditasi Sinta. Kata kunci pencarian difokuskan pada istilah-istilah seperti transisi politik Indonesia, Orde Lama, Orde Baru, Reformasi Indonesia, dinasti politik, dan desentralisasi politik Indonesia. Tahun publikasi dibatasi pada rentang 2018-2024 untuk memastikan relevansi dan kebaruan data, namun juga mencakup literatur klasik dan seminal dari periode sebelumnya yang penting untuk kajian historis.

Kriteria inklusi mencakup artikel jurnal ilmiah, buku akademik, serta skripsi dan tesis. Namun, penelitian ini tidak melibatkan wawancara lapangan atau survei langsung, sehingga perspektif aktor politik atau masyarakat tidak tergal secara langsung. Selain itu, keterbatasan akses terhadap dokumen primer, seperti arsip resmi pemerintah, dapat mempengaruhi kedalaman analisis data. Analisis data dilakukan secara kritis dan tematik, dengan memetakan pola-pola kontinuitas dan perubahan dalam praktik politik pada tiap rezim. Data yang terkumpul dikelompokkan berdasarkan era pemerintahan (Orde Lama, Orde Baru, Reformasi) dan tema kajian (struktur kekuasaan, partisipasi politik, pengaruh oligarki). Proses analisis dimulai dengan identifikasi tema utama berdasarkan kata kunci, dilanjutkan dengan koding data, dan diakhiri dengan interpretasi kritis yang mengaitkan temuan-temuan tersebut dengan kerangka teoritis dan konteks sejarah politik Indonesia. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang mendalam, reflektif, dan berimbang mengenai dinamika politik Indonesia, serta menyumbang secara ilmiah pada kajian politik dan pemerintahan di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Perjalanan politik Indonesia pasca kemerdekaan tidak berjalan linier, melainkan penuh dengan dinamika, konflik, dan transformasi. Setiap periode kekuasaan dari Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi memiliki karakteristik dan dampak tersendiri terhadap struktur pemerintahan dan partisipasi politik masyarakat. Untuk memahami evolusi sistem politik Indonesia secara utuh, perlu ditelusuri terlebih dahulu bagaimana fondasi kekuasaan dibangun sejak awal kemerdekaan dan bagaimana transisi kekuasaan tersebut dapat dijelaskan melalui kerangka teori transisi demokrasi, kultur politik, dan oligarki.

Orde Lama: Demokrasi Parlementer dan Konsolidasi Kekuasaan

Masa Orde Lama (1945-1966) merupakan periode awal pascakemerdekaan yang penuh dengan dinamika politik dan percobaan sistem pemerintahan. Eksperimen demokrasi parlementer yang dijalankan antara tahun 1950 hingga 1959 justru memunculkan tantangan serius, seperti instabilitas kabinet, konflik ideologis antar partai, serta kurangnya kohesi nasional. Dalam waktu kurang dari sembilan tahun, Indonesia mengalami lebih dari tujuh kali pergantian kabinet, yang mengindikasikan lemahnya fondasi politik serta minimnya kesepakatan bersama antarelite politik (Dewi, 2024). Keadaan ini akhirnya mendorong Presiden Soekarno untuk mengambil langkah drastis dengan mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan memberlakukan Demokrasi Terpimpin.

Dalam sistem Demokrasi Terpimpin, kekuasaan presiden menjadi sangat dominan. Lembaga legislatif dan yudikatif tidak lagi memiliki posisi yang seimbang dalam mekanisme check and balances. (Nabela et al., 2024) menyatakan bahwa "Demokrasi Pancasila pada masa Orde Lama mengalami distorsi dalam pelaksanaannya, di mana kekuasaan terpusat pada presiden, mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional." Keputusan dan kebijakan politik lebih banyak bersumber dari kehendak tunggal presiden, dan sistem multipartai mengalami penyesuaian untuk mendukung visi ideologis negara dalam kerangka Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme).

Peran militer juga mulai memainkan peran signifikan dalam politik nasional pada masa ini. Militer tidak hanya berfungsi sebagai alat pertahanan negara, tetapi juga mulai masuk ke dalam ruang-ruang politik dan administratif. Menurut (Zulaiha et al., 2022), "Pengaruh sosial politik pada metodologi penafsiran di Indonesia menunjukkan bahwa dinamika kekuasaan sangat mempengaruhi interpretasi terhadap hukum dan kebijakan negara." Dengan kata lain, kekuasaan militer dan eksekutif secara perlahan membentuk

pola relasi kuasa baru yang mengaburkan batas antara sipil dan militer. Konsekuensinya, ruang partisipasi publik menyempit, dan kritik terhadap pemerintah cenderung ditekan dalam kerangka stabilitas nasional.

Penerapan ideologi tunggal dalam kehidupan bernegara juga mempersempit keragaman pandangan politik dan memperkuat sentralisasi kekuasaan. Politisasi simbol-simbol negara digunakan untuk mengkonsolidasikan kekuasaan sekaligus membungkam oposisi. Dalam konteks ini, awal masa kemerdekaan yang seharusnya menjadi momentum pembentukan demokrasi yang sehat justru berubah menjadi periode konsolidasi kekuasaan yang otoriter. Pengalaman inilah yang kemudian membentuk dasar munculnya kekuasaan yang lebih terstruktur dan militeristik pada masa Orde Baru.

Kondisi ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Samuel P. Huntington (1991) tentang Teori Transisi Demokrasi. Huntington berpendapat bahwa transisi demokrasi pada negara-negara berkembang sering kali mengalami fase kemunduran demokrasi (*democratic backsliding*), di mana upaya menuju sistem demokrasi justru berubah menjadi konsolidasi kekuasaan otoriter akibat ketidakstabilan politik dan lemahnya institusi demokrasi. Dalam konteks Orde Lama, ketidakstabilan kabinet dan konflik ideologi memberikan ruang bagi Soekarno untuk mengambil alih kekuasaan secara penuh melalui Demokrasi Terpimpin, suatu bentuk kemunduran demokrasi yang justru memperkuat sentralisasi kekuasaan di tangan eksekutif. Dengan demikian, Orde Lama menjadi contoh konkret bagaimana fase transisi demokrasi dapat berujung pada konsolidasi kekuasaan yang lebih otoriter.

Orde Baru: Otoritarianisme dan Pembangunan Ekonomi

(Rajab, 2022) mencatat bahwa "pemerintahan Orde Baru mengadopsi sistem otoritarianisme-birokratik, di mana militer dan birokrasi memainkan peran dominan dalam mengendalikan kehidupan politik dan sosial masyarakat." Militer diberi peran aktif dalam urusan sipil melalui konsep dwifungsi ABRI, yang memungkinkan mereka terlibat dalam pemerintahan dan parlemen. Akibatnya, kehidupan politik menjadi sangat terkonsentrasi di tangan eksekutif, dengan parlemen dan lembaga yudikatif berfungsi secara simbolis semata.

Salah satu instrumen penting dalam menjaga dominasi rezim adalah media massa. Pemerintah Orde Baru menggunakan media sebagai alat propaganda untuk membangun citra stabilitas dan keberhasilan pembangunan. (Bakri, 2023) menyatakan bahwa "media pada masa Orde Baru berfungsi sebagai alat kontrol negara, membatasi kebebasan pers dan mengarahkan opini publik sesuai dengan kepentingan rezim." Kritik

terhadap pemerintah disensor secara sistematis, dan hanya narasi yang mendukung status quo yang diizinkan untuk dipublikasikan. Hal ini menjadikan media kehilangan fungsi idealnya sebagai pengawas kekuasaan.

Selain itu, struktur politik yang sentralistik dan militeristik mempersempit ruang partisipasi masyarakat serta memperlemah peran daerah dalam pengambilan keputusan. Sentralisasi kekuasaan di Jakarta menciptakan ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah, serta memperbesar ketidakpuasan publik terhadap sistem yang ada. Menurut (Kompas.com, 2020), "Penerapan sistem sentralistik dan militeristik menjadi salah satu penyebab keretakan tersebut." Ketidakmampuan pemerintah untuk merespons secara adil terhadap krisis ekonomi 1997-1998 semakin memperparah situasi.

Pada akhirnya, meskipun Orde Baru berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi, keberhasilan tersebut tidak berbanding lurus dengan pembangunan politik yang demokratis. Otoritarianisme yang mengakar justru menjadi kelemahan utama yang menggoyahkan legitimasi rezim. Runtuhnya Orde Baru menjadi bukti bahwa pembangunan tanpa demokrasi sejati tidak dapat bertahan dalam jangka panjang, dan menjadi pelajaran penting bagi arah politik Indonesia selanjutnya.

Teori Otoritarianisme Pembangunan (Developmental Authoritarianism) yang dikemukakan oleh Garry Rodan (1996) menjelaskan bahwa rezim otoritarian sering kali menggunakan pembangunan ekonomi sebagai alat untuk memperoleh legitimasi politik. Dalam konteks Orde Baru, pembangunan ekonomi dijadikan narasi utama untuk menjustifikasi sentralisasi kekuasaan dan pengendalian militer terhadap masyarakat. Namun, sebagaimana dikemukakan oleh Rodan, pembangunan ekonomi yang tidak disertai demokratisasi justru rentan terhadap krisis legitimasi ketika stabilitas ekonomi terganggu. Hal ini terbukti saat krisis ekonomi 1997-1998 melanda Indonesia, ketika pembangunan ekonomi yang selama ini menjadi dasar legitimasi rezim Soeharto justru runtuh, membuka ruang bagi tuntutan reformasi dan perubahan politik secara besar-besaran.

Reformasi: Transisi Menuju Demokrasi dan Tantangannya

Krisis ekonomi Asia tahun 1997 yang melanda Indonesia bukan hanya menyebabkan gejolak finansial, tetapi juga memperburuk ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahan Orde Baru yang telah lama berkuasa. Ketidakpuasan yang mengakar terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) memicu gelombang protes besar-besaran dari mahasiswa, masyarakat sipil, dan kelompok pro-demokrasi. Tekanan yang terus meningkat akhirnya memaksa Presiden Soeharto untuk mengundurkan diri pada Mei 1998, menandai dimulainya era Reformasi.

(Dewi, 2024) menjelaskan bahwa "Reformasi 1998 merupakan titik balik penting dalam transisi dari rezim otoriter Orde Baru ke era demokratis, ditandai dengan meningkatnya partisipasi politik dan kebebasan sipil." Sejak saat itu, Indonesia mulai mengadopsi berbagai kebijakan reformasi, termasuk pemilu langsung, pembentukan lembaga-lembaga independen, serta revisi terhadap sistem pemisahan kekuasaan. Peran masyarakat sipil pun meningkat pesat, dengan hadirnya organisasi non-pemerintah, media independen, dan forum-forum demokrasi yang memperkuat suara rakyat dalam sistem politik.

Namun, proses demokratisasi yang terjadi lebih banyak bersifat prosedural dibandingkan substansial. Demokrasi yang dibangun pasca-Orde Baru masih belum sepenuhnya menyentuh akar permasalahan, seperti reformasi birokrasi, supremasi hukum, dan keadilan sosial. (Mahpudin, 2021) mengemukakan bahwa "demokrasi Indonesia pasca reformasi masih terjebak pada demokrasi prosedural yang hanya berkelindan soal urusan pemilu dan proses pergantian elit." Pemilu memang rutin dilaksanakan, tetapi sering kali dipenuhi oleh praktik politik uang, oligarki, dan politik identitas yang justru memperlemah kualitas demokrasi itu sendiri.

Perubahan konstitusional menjadi bagian penting dari proses transisi ini. Amandemen terhadap UUD 1945 dilakukan sebanyak empat kali antara tahun 1999 hingga 2002, yang mengubah secara signifikan struktur ketatanegaraan Indonesia. Meski demikian, dasar negara tetap dipertahankan. (Jadidah, 2020) mencatat bahwa "pada masa transisi orde baru menuju reformasi, tidak terjadi perubahan terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang isinya memuat Pancasila." Ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi pembaruan dalam kerangka institusional, nilai-nilai fundamental seperti Pancasila tetap dijaga sebagai fondasi moral dan ideologis negara.

Di sisi lain, desentralisasi yang dilakukan dalam rangka otonomi daerah juga membawa tantangan baru. Banyak daerah menghadapi masalah dalam hal tata kelola pemerintahan, transparansi, serta munculnya elite-elite lokal yang justru mereplikasi pola kekuasaan lama. Hal ini mengindikasikan bahwa transisi menuju demokrasi bukanlah proses linier, melainkan penuh tarik-menarik antara kekuatan lama dan tuntutan perubahan. Untuk itu, konsolidasi demokrasi di Indonesia masih membutuhkan waktu, kerja keras, dan komitmen bersama dari semua pihak, baik negara maupun masyarakat sipil.

Dalam konteks ini, proses transisi politik Indonesia dapat dianalisis menggunakan Teori Transisi Demokrasi (Democratic Transition Theory) yang dikemukakan oleh

Guillermo O'Donnell dan Philippe Schmitter (1986). Menurut teori ini, transisi demokrasi tidak selalu menghasilkan demokrasi substansial, melainkan sering kali hanya demokrasi prosedural yang ditandai dengan pemilu bebas dan lembaga-lembaga demokratis secara formal. Kondisi ini relevan dengan situasi Indonesia pasca-Reformasi, di mana meskipun terjadi peningkatan partisipasi politik dan kebebasan sipil, substansi demokrasi masih terhambat oleh praktik oligarki, korupsi, dan politik uang. O'Donnell dan Schmitter juga menekankan bahwa keberhasilan transisi demokrasi sangat tergantung pada keberadaan aktor reformis yang kuat serta komitmen untuk melakukan reformasi struktural yang mendalam. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih berada dalam fase transisi yang belum sepenuhnya mencapai demokrasi yang matang dan berfungsi secara efektif.

Kontinuitas dan Perubahan dalam Praktik Politik

Meskipun terjadi perubahan signifikan dalam struktur dan sistem politik Indonesia pasca-Reformasi, beberapa praktik lama dari masa Orde Baru masih tetap berlanjut dalam berbagai bentuk. Seperti yang dijelaskan oleh (Ulla et al., 2024), "kemunculan dinasti politik pasca reformasi mengindikasikan replikasi pola-pola kekuasaan Orde Baru dalam wajah baru." Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mekanisme demokrasi seperti pemilu langsung telah diterapkan, substansi dari demokrasi itu sendiri masih menghadapi tantangan serius. Politik dinasti berkembang subur di berbagai daerah karena lemahnya kaderisasi partai politik dan minimnya pengawasan terhadap praktik nepotisme di tingkat lokal.

Selain itu, desentralisasi kekuasaan yang diterapkan sejak awal era Reformasi, meskipun bertujuan memperkuat otonomi daerah dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, justru menimbulkan tantangan baru. (Nabela et al., 2024) mencatat bahwa "era Reformasi ditandai dengan desentralisasi, penguatan demokrasi, dan peningkatan penghormatan terhadap HAM, meskipun dihadapkan pada tantangan seperti fragmentasi politik, konflik sosial, dan ketimpangan pembangunan." Dalam praktiknya, otonomi daerah kerap dimanfaatkan oleh elit lokal untuk membangun basis kekuasaan sendiri, yang pada akhirnya mereproduksi bentuk-bentuk kekuasaan lama dalam konteks yang lebih lokal.

Fragmentasi politik juga menjadi fenomena baru yang menandai masa Reformasi. Banyaknya partai politik yang muncul pasca-reformasi tidak selalu memperkaya kualitas demokrasi, melainkan menciptakan instabilitas koalisi serta politik transaksional di parlemen. Menurut (Mahpudin, 2021), kondisi ini membuka ruang bagi bangkitnya politik identitas yang kerap dimanfaatkan dalam kontestasi elektoral. Hal ini secara tidak

langsung membahayakan prinsip pluralisme yang menjadi fondasi utama demokrasi Indonesia.

Dengan demikian, meskipun Indonesia telah memasuki era yang secara formal demokratis, praktik politik yang berlangsung menunjukkan adanya kontinuitas dari pola-pola kekuasaan sebelumnya. Perubahan institusional belum sepenuhnya diikuti oleh perubahan budaya politik, sehingga agenda reformasi perlu terus diperkuat tidak hanya pada aspek struktural, tetapi juga pada tataran nilai dan etika politik.

Kondisi tersebut dapat kita analisis menggunakan Teori Institusionalisme Baru (New Institutionalism Theory) yang dikemukakan oleh James G. March dan Johan P. Olsen (1984). Menurut teori ini, perubahan institusional tidak hanya terjadi melalui restrukturisasi formal, tetapi juga melalui proses penanaman norma, budaya, dan praktik yang berlangsung lama dalam sistem politik. Dalam konteks Indonesia, meskipun terjadi perubahan struktur politik dan sistem pemilu pasca-Reformasi, praktik oligarki, politik dinasti, dan kontrol elit lokal tetap bertahan sebagai hasil dari institusi informal yang telah mengakar sejak masa Orde Baru. March dan Olsen menyebutkan bahwa institusi tidak hanya terdiri dari aturan formal, tetapi juga pola-pola perilaku yang melekat dalam aktor politik, yang pada akhirnya mempengaruhi bagaimana mereka beradaptasi terhadap perubahan sistem. Dengan demikian, kontinuitas praktik politik lama di Indonesia menunjukkan bahwa perubahan politik tidak hanya membutuhkan restrukturisasi kelembagaan, tetapi juga perubahan budaya politik secara mendalam.

Kesimpulan

Perjalanan politik Indonesia sejak kemerdekaan hingga era Reformasi menunjukkan dinamika yang kompleks dan tidak linier. Setiap periode kekuasaan baik Orde Lama, Orde Baru, maupun Reformasi meninggalkan jejak yang membentuk wajah politik Indonesia hari ini. Meskipun terjadi perubahan institusional menuju sistem yang lebih demokratis, berbagai tantangan seperti sentralisasi kekuasaan, dominasi militer, politik dinasti, dan demokrasi prosedural masih terus membayangi. Ini menandakan bahwa demokratisasi sejati membutuhkan bukan hanya perubahan struktur, tetapi juga pergeseran budaya politik dan komitmen kuat terhadap nilai-nilai demokrasi.

Untuk mewujudkan perubahan budaya politik tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis yang lebih konkret. Pertama, pendidikan politik bagi generasi muda harus ditingkatkan untuk menumbuhkan kesadaran kritis terhadap pentingnya demokrasi substantif, bukan sekadar prosedural. Kedua, regulasi yang lebih tegas perlu

diterapkan untuk membatasi praktik politik dinasti dan oligarki agar proses politik menjadi lebih terbuka dan kompetitif. Ketiga, penguatan peran masyarakat sipil dan media massa harus terus didorong sebagai bentuk kontrol sosial terhadap praktik penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi politik. Dengan strategi tersebut, harapannya transisi demokrasi di Indonesia tidak hanya berhenti pada tataran institusional, tetapi juga menyentuh aspek-aspek fundamental dalam budaya politik masyarakat.

Daftar Pustaka

- Arikunto, S. (2014). Prosedur penelitian suatu praktek. *Jakarta: Bina Aksara*, 78(3), 3.
- Bakri. (2023). Pengaruh Media Terhadap Pemerintahan dan Politik Masa Orde Baru dan Pasca Reformasi. *At-Tabayyun: Journal Islamic Studies*, 1(2), 50–65.
- Dewi, N. K. (2024). Reformasi 1998 : Transisi dari Orde Baru ke Era Demokrasi di Indonesia. *HISTORIA VITAE: Seri Pengetahuan Dan Pengajaran Sejarah*, 04(02), 76–90.
- Hidayat, W., & Taufikurrahman, T. (2020). Aktivisme Politik Mahasiswa Islam Membangun Demokrasi Pasca Orde Baru. *SANGKEP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, 3(2), 129–144. <https://doi.org/10.20414/sangkep.v3i2.1934>
- Huntingto, & Samuel, P. (1991). *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. Norman : University of Oklahoma Press. Internet Archive Books
- Jadidah, F. (2020). Perubahan Konstitusi Dalam Transisi Orde Baru Menuju Reformasi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6(1), 149–161. <https://doi.org/10.58258/jime.v6i1.1120>
- Kompas.com. (2020). *Jejak Sentralisasi dan Militerisme dalam Pemerintahan Orde Baru*. <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/20/08082941/jejak-sentralisasi-dan-militerisme-dalam-pemerintahan-orde-baru>
- Mahpudin, M. (2021). Kebangkitan Politik Identitas dalam Proses Demokratisasi di Indonesia Pasca Orde Baru. *Jurnal Sosial Politik*, 7(2), 148–160. <https://doi.org/10.22219/sospol.v7i2.10781>

- Mustamin. (2024). Analisis Ketatanegaraan Berdasarkan Historis Ketatanegaraan Republik Indonesia Periode Orde Lama, Orde Baru Dan Reformasi. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 6(1), 82–94. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v6i1.2663>
- Nabela, P., Nisya, R., & Maulia, S. T. (2024). Demokrasi Pancasila Sebagai Landasan Konstitusi dan Sistem Politik Indonesia Era Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. *CAUSA: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 3(6).
- O'Donnell, & Schmitter, G. A. (2011). *Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies (1986)* (4. impr.). Baltimore : Johns Hopkins University Press.
- Permana, P. A. (2022). Kontradiksi Struktural dalam Politik Lokal Indonesia Pasca Orde Baru. *Langgas: Jurnal Studi Pembangunan*, 1(2), 56–69. <https://doi.org/10.32734/ljsp.v1i2.9712>
- Rajab, B. (2022). Otoritarianisme-birokratik orde baru, krisis ekonomi dan politik, dan demokrasi formal masa reformasi. *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics)*, 8(1), 59–78. <https://doi.org/10.20473/jpi.v8i1.21817>
- Rodan, G. (2013). *Political Oppositions in Industrialising Asia* (1st Editio). <https://doi.org/10.4324/9780203441145>
- Ulla, F. N., Erviantono, T., & Noak, P. A. (2024). Analisis Dinasti Politik Jokowi: Resiko Terulangnya Era Orde Baru. *RETORIKA: Jurnal Komunikasi, Sosial, Dan Ilmu Politik*, 7482, 29–34.
- Zulaiha, E., Agustin, K. F., & Rahman, N. Al. (2022). Pengaruh Sosial Politik Pada Metodologi Penafsiran di Indonesia (Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi). *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 5(1), 25–34. <https://doi.org/10.15575/hanifiya.v5i1.15538>